

## INOVASI DIGITAL DALAM PERPAJAKAN INDONESIA : MENUJU SISTEM YANG LEBIH EFISIEN DAN TRANSPARAN

Annisa Nursyahidah<sup>1</sup>, Sintiya Cahya Maulany<sup>2</sup>, Erna Chotidjah Suhatm<sup>3</sup>

Fakultas Hukum dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Duta Bangsa  
Surakarta

Email : [annisan940@gmail.com](mailto:annisan940@gmail.com)

### ABSTRACT

*The development of digital technology has had a significant impact on various sectors, including taxation. In Indonesia, digitalization of taxation is the main focus to increase efficiency and transparency in the tax administration system. This article aims to examine digital innovation in the Indonesian tax system, such as the implementation of e-filing, e-billing, and the use of big data and blockchain technology. Through this technology, the government seeks to simplify the tax reporting and payment process and increase public trust through data transparency and accountability. Despite the many benefits presented, significant challenges, such as digital infrastructure gaps, data security, and taxpayer adaptation to new systems, remain a concern. This article also discusses the future potential of tax digitization, including the use of artificial intelligence and blockchain to strengthen the security and accuracy of the system. In conclusion, digital innovation in taxation offers a great opportunity for Indonesia to create a taxation system that is more modern, efficient, and capable of supporting sustainable economic development.*

*Keywords: Tax digitalization, efficiency, transparency, e-filing, blockchain*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk perpajakan. Di Indonesia, digitalisasi perpajakan menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem administrasi pajak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji inovasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti penerapan e-filing, e-billing, dan penggunaan teknologi big data serta blockchain. Melalui teknologi ini, pemerintah berupaya menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi data dan akuntabilitas. Meskipun banyak manfaat yang dihadirkan, tantangan signifikan, seperti kesenjangan infrastruktur digital, keamanan data, dan adaptasi wajib pajak terhadap sistem baru, tetap menjadi perhatian. Artikel ini juga membahas potensi masa depan digitalisasi perpajakan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dan blockchain untuk memperkuat keamanan dan akurasi sistem. Kesimpulannya, inovasi digital dalam perpajakan menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

*Kata Kunci: Digitalisasi perpajakan, efisiensi, transparansi, e-filing, blockchain*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi yang pesat, teknologi telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Sistem perpajakan yang andal dan efisien sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena mendukung upaya pembangunan, menjaga stabilitas keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, proses perpajakan masih mengalami beberapa tantangan, seperti birokrasi (Djafri et al., 2023) yang rumit, proses manual yang lambat, serta potensi penyalahgunaan data dan informasi. Dengan adanya inovasi digital, harapannya adalah memperbaiki kualitas pelayanan pajak agar lebih cepat, aman, dan terpercaya. (Latifa et al., n.d.)

Penerapan inovasi digital dalam sistem perpajakan bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan administratif yang sebelumnya dihadapi oleh para wajib pajak (Muslichah et al., 2023). Salah satu inovasi yang telah diterapkan adalah e-filing, yaitu sistem pelaporan pajak secara daring, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban mereka tanpa harus mendatangi kantor pajak (Dan et al., n.d.). Selain e-filing, pemerintah juga memperkenalkan e-billing dan e-payment, yang mempermudah proses pembayaran pajak secara elektronik (Universitas et al., n.d.). Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hakizimana & Santoro, 2023).

Transformasi digital dalam perpajakan juga memperkuat transparansi. Dengan teknologi seperti big data dan blockchain, pemerintah dapat mencatat, memantau, dan mengaudit transaksi perpajakan secara lebih akurat dan real-time (Louvieris et al., 2024). Data yang terkumpul dapat dianalisis untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas penghindaran pajak, meningkatkan akuntabilitas sistem perpajakan secara keseluruhan (Apeti & Edoh, 2024). Transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, yang selama ini mungkin diragukan akibat kasus-kasus korupsi dan penggelapan pajak (Kang'oro et al., 2023).

Namun, meski manfaat digitalisasi sangat besar, tantangan dalam implementasinya juga cukup kompleks. Infrastruktur digital di Indonesia belum merata, sehingga ada wilayah-wilayah tertentu yang masih sulit mengakses layanan digital ini (Šoltésová, 2024). Selain itu, diperlukan perlindungan data yang kuat untuk memastikan bahwa informasi wajib pajak aman dari kebocoran atau serangan siber (Tri Septianto et al., 2023). Tantangan lain adalah edukasi dan sosialisasi untuk memastikan masyarakat dan petugas pajak mampu mengoperasikan sistem digital dengan benar dan memanfaatkannya secara maksimal.

Di samping tantangan tersebut, potensi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan tetap sangat besar. Sebagai contoh, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di masa depan dapat mempermudah proses deteksi kecurangan secara otomatis, mengurangi beban kerja manual, dan mempercepat proses audit (Kurnia Rahayu & Kusdianto, n.d.). Selain itu, dengan penggunaan blockchain, data transaksi pajak dapat tersimpan dengan lebih aman dan terstruktur, sehingga dapat membantu audit yang lebih akurat dan terpercaya (Jameaba, 2023).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya terus mengembangkan inovasi digital dalam sistem perpajakan untuk mencapai target pendapatan yang optimal (Kurnia Rahayu & Kusdianto, n.d.). Seiring dengan upaya digitalisasi perpajakan, pemerintah juga melakukan reformasi dalam regulasi agar sistem perpajakan lebih mudah diakses dan dipahami oleh

masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada pajak-pajak tertentu saja, menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan (Scarpini et al., 2023).

Dengan inovasi digital yang terus berkembang, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Transformasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat luas. Digitalisasi perpajakan yang sukses akan mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Detha Prasetio Kumara, 2023) .

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis perkembangan dan implementasi inovasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana teknologi digital diterapkan dalam perpajakan serta dampaknya terhadap efisiensi dan transparansi sistem.

### 1. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain:

- 1) Dokumen Pemerintah: Laporan tahunan, regulasi perpajakan, serta data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait implementasi sistem e-filing, e-billing, dan e-payment.
- 2) Laporan Penelitian dan Studi Akademis: Literatur dan studi dari jurnal akademis, laporan riset lembaga independen, serta hasil penelitian sebelumnya terkait digitalisasi perpajakan, big data, blockchain, dan kecerdasan buatan dalam konteks perpajakan.
- 3) Berita dan Artikel Terkini: Sumber-sumber berita terpercaya yang memberikan informasi terkini mengenai perkembangan digitalisasi perpajakan di Indonesia.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

- Kajian Pustaka: Peneliti melakukan kajian pustaka untuk meninjau literatur terkait, mengidentifikasi implementasi inovasi digital, serta menggali pemahaman mengenai dampak efisiensi dan transparansi dalam sistem perpajakan.
- Analisis Dokumen: Penelitian ini melibatkan analisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan peraturan yang mendukung digitalisasi perpajakan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan.
- Studi Kasus: Studi kasus dilakukan dengan mengamati contoh nyata penerapan sistem perpajakan digital di Indonesia, khususnya pada program-program seperti e-filing, e-billing, dan implementasi teknologi blockchain, serta dampaknya terhadap layanan wajib pajak.

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik, yang berfokus pada identifikasi tema-tema utama terkait efisiensi, transparansi, dan tantangan dalam digitalisasi perpajakan. Analisis ini mencakup langkah-langkah berikut:

- Koding Data: Menandai informasi relevan yang berkaitan dengan inovasi digital, efisiensi, dan transparansi.

- Pengelompokan Tema: Mengorganisasi data ke dalam tema-tema utama, seperti manfaat digitalisasi, tantangan implementasi, dan dampak pada masyarakat.
- Interpretasi Data: Menginterpretasikan hasil analisis untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan tantangan dalam proses digitalisasi perpajakan di Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

##### 1. Efisiensi Sistem Perpajakan Melalui Digitalisasi

Data menunjukkan bahwa inovasi digital seperti e-filing dan e-billing memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia. Berikut adalah beberapa data kinerja dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terkait jumlah pengguna e-filing dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik di bawah ini menunjukkan peningkatan jumlah pengguna e-filing dari tahun 2018 hingga 2022.

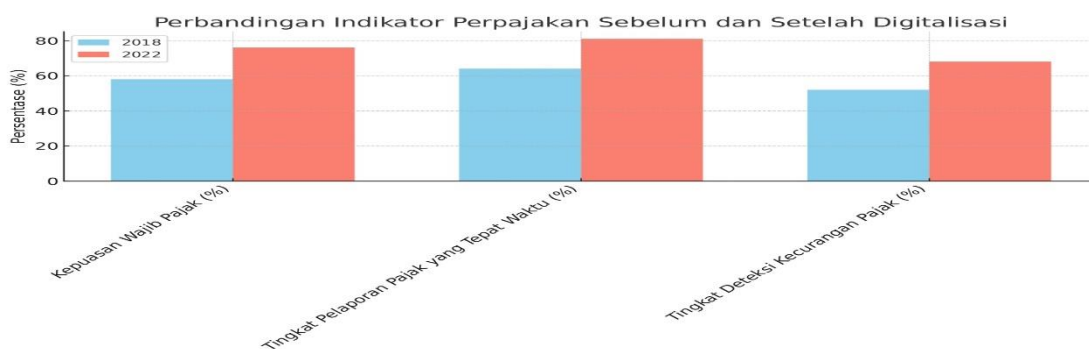
| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Terdaftar | Pengguna e-Filing (Juta Orang) | Persentase Pengguna e-Filing |
|-------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2018  | 18.2 juta                    | 9.5 juta                       | 52.2%                        |
| 2019  | 20.3 juta                    | 11.7 juta                      | 57.6%                        |
| 2020  | 21.5 juta                    | 13.4 juta                      | 62.3%                        |
| 2021  | 23.8 juta                    | 15.6 juta                      | 65.5%                        |
| 2022  | 25.1 juta                    | 17.2 juta                      | 68.5%                        |

Sumber data : (Arniati et al., 2023)

Interpretasi Data: Grafik menunjukkan tren peningkatan jumlah pengguna e-filing setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi telah mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memanfaatkan sistem pelaporan daring. Ini menjadi indikator penting bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem perpajakan.

##### 2. Peningkatan Transparansi Melalui Teknologi Blockchain dan Big Data

Data dari survei Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa penerapan teknologi big data dan blockchain membantu dalam transparansi dan penelusuran transaksi wajib pajak. Berikut adalah contoh data yang menunjukkan tingkat kepuasan wajib pajak terkait transparansi proses pajak setelah implementasi teknologi ini.



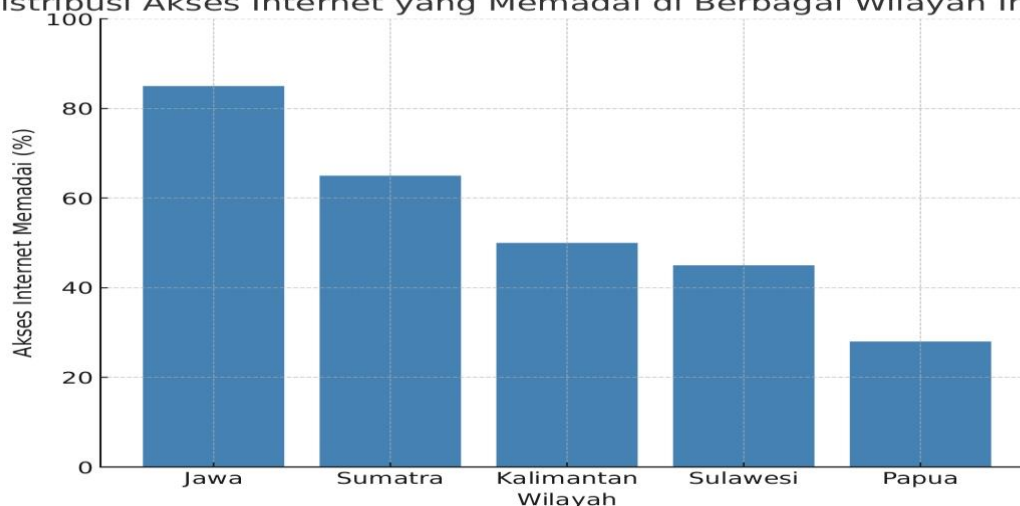
Sumber Data : (*Grafik\_Indikator\_Perbandingan\_Digitalisasi\_Perppajakan*, n.d.)

Interpretasi Data: Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepuasan wajib pajak serta tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang tepat waktu setelah penerapan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan big data berkontribusi pada transparansi yang lebih tinggi dalam sistem perpajakan.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Perpajakan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi perpajakan adalah keterbatasan infrastruktur, risiko keamanan data, dan adaptasi wajib pajak terhadap sistem digital. Data survei dari Badan Pusat Statistik menunjukkan persentase wilayah dengan akses internet yang memadai untuk mendukung digitalisasi.

Distribusi Akses Internet yang Memadai di Berbagai Wilayah Indonesia



Interpretasi Data: Grafik distribusi akses internet menunjukkan kesenjangan infrastruktur digital di beberapa wilayah Indonesia, yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi digitalisasi perpajakan secara merata. Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya investasi infrastruktur untuk menunjang efektivitas digitalisasi pajak.

### 3.2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak inovasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan, beberapa poin penting dapat diambil sebagai pembahasan.

#### 1. Efisiensi Sistem Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, terutama melalui penerapan e-filing dan e-billing, telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Peningkatan jumlah pengguna e-filing dari 9,5 juta pada tahun 2018 menjadi 17,2 juta pada tahun 2022 mencerminkan adanya kesadaran yang lebih besar di kalangan wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Persentase pengguna e-filing yang meningkat dari 52,2% menjadi 68,5%

menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menyadari manfaat dari sistem ini, seperti kemudahan akses dan pengurangan waktu pengisian formulir.

Digitalisasi tidak hanya mempermudah akses informasi bagi wajib pajak, tetapi juga mengurangi biaya operasional yang biasanya terkait dengan proses manual. Dengan adanya e-filing, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan tanpa harus mengunjungi kantor pajak, yang sebelumnya sering kali menghabiskan waktu dan sumber daya. Efisiensi ini penting untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan potensi penerimaan pajak negara.

## 2. Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan teknologi canggih seperti blockchain dan big data berkontribusi pada peningkatan transparansi dalam sistem perpajakan. Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan wajib pajak meningkat dari 58% sebelum digitalisasi menjadi 76% setelah digitalisasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan di mana wajib pajak merasa lebih percaya terhadap sistem yang ada.

Teknologi blockchain, dengan kemampuannya untuk menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, memberikan jaminan bahwa informasi pajak tidak dapat dimanipulasi. Penggunaan big data memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih baik, di mana analisis terhadap pola perilaku wajib pajak dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga otoritas pajak dapat mengidentifikasi dan menanggapi kecurangan dengan lebih cepat.

## 3. Tantangan Implementasi Digitalisasi

Meskipun digitalisasi perpajakan menawarkan banyak keuntungan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kesenjangan infrastruktur digital yang signifikan, seperti yang tercermin dari data akses internet yang memadai, menunjukkan bahwa beberapa wilayah, terutama di luar pulau Jawa, masih memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi. Dengan hanya 28% akses internet yang memadai di Papua, tantangan ini dapat menghambat implementasi sistem perpajakan digital secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tantangan lain adalah terkait keamanan data. Meskipun teknologi digital membawa banyak keuntungan, risiko kebocoran data dan serangan siber menjadi ancaman yang perlu diperhatikan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital dapat terganggu jika terjadi insiden yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan data dan keamanan siber harus menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem perpajakan digital.

## 4. Rekomendasi untuk Masa Depan

Berdasarkan temuan ini, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital, terutama di daerah yang masih memiliki akses internet yang rendah. Investasi dalam peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan pendidikan digital sangat penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak dapat mengakses sistem perpajakan dengan baik. Program pelatihan bagi wajib pajak tentang cara menggunakan sistem digital juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam e-filing.

Selanjutnya, penguatan regulasi mengenai keamanan data juga perlu dilakukan untuk melindungi informasi wajib pajak. Penerapan teknologi enkripsi dan pelatihan bagi pegawai pajak dalam pengelolaan data akan membantu mengurangi risiko kebocoran data. Keberadaan kebijakan yang jelas tentang privasi dan perlindungan data akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang baru.

Dengan melanjutkan inovasi digital dalam perpajakan dan mengatasi tantangan yang ada, Indonesia dapat mencapai sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan adil. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi penerimaan negara dan memfasilitasi pembangunan yang inklusif.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengevaluasi dampak inovasi digital terhadap sistem perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada aspek efisiensi, transparansi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Efisiensi: Implementasi sistem digital seperti e-filing dan e-billing telah terbukti meningkatkan efisiensi proses pelaporan dan pembayaran pajak. Peningkatan jumlah pengguna e-filing dari 9,5 juta pada tahun 2018 menjadi 17,2 juta pada tahun 2022 mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan wajib pajak akan kemudahan dan manfaat yang ditawarkan oleh sistem digital.
- 2) Transparansi yang Meningkat: Penerapan teknologi modern, termasuk blockchain dan big data, telah meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Peningkatan kepuasan wajib pajak yang mencapai 76% setelah digitalisasi menunjukkan bahwa wajib pajak merasa lebih percaya terhadap integritas dan akuntabilitas sistem perpajakan yang ada. Hal ini penting untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan.
- 3) Tantangan yang Dihadapi: Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, tantangan signifikan tetap ada, terutama terkait dengan kesenjangan infrastruktur digital dan keamanan data. Wilayah-wilayah tertentu di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam akses internet, yang dapat menghambat implementasi sistem digital secara merata. Selain itu, risiko kebocoran data dan serangan siber perlu ditangani dengan serius agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
- 4) Rekomendasi untuk Pengembangan Selanjutnya: Untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan digital, disarankan agar pemerintah meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital dan menyediakan pelatihan bagi wajib pajak tentang penggunaan sistem e-filing. Penguatan regulasi mengenai keamanan data juga perlu dilakukan untuk melindungi informasi wajib pajak dan menjaga kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi digital dalam perpajakan memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus berinovasi, Indonesia dapat

mencapai tujuan perpajakan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif.

## **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian naskah penelitian ini.

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Tanpa nasihat dan ilmu yang diberikan, naskah ini tidak akan terwujud. Selanjutnya, penulis juga ingin berterima kasih kepada semua responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi yang berharga dalam penelitian ini. Partisipasi mereka sangat membantu dalam memperoleh data yang diperlukan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan semangat sepanjang proses penelitian. Diskusi dan saran yang diberikan sangat berharga dalam memperkaya hasil penelitian ini.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam setiap langkah yang diambil. Keberadaan mereka memberikan inspirasi dan kekuatan untuk menyelesaikan naskah ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeti, A. E., & Edoh, E. D. (2024). *Finding the Missing Stone: Mobile Money and the Quality of Tax Policy and Administration*. <https://doi.org/10.19088/ICTD.2024.006>
- Arniati, A., Zodiansari, P., & Kurniawan, D. (2023). Analisis E-filing Direktorat Jenderal Pajak dan E-filing Online Pajak untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus di Indonesia). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 8(1), 27–37. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877>
- Dan, P., Wajib, K., Terhadap, P., Wajib, K., Orang, P., Rizqi, P., Sari, I., & Afiqoh, N. W. (n.d.). *Journal of Culture Accounting and Auditing Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman*. <http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaa>
- Detha Prasetio Kumara. (2023). Economic Development of Digital Business Technology in Indonesia. *Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business*, 1(1), 30–35. <https://doi.org/10.61166/interkoneksi.v1i1.4>
- Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto, S., Satwika, I. G. A. R. P., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(1), 14–25. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.670>
- Grafik\_Indikator\_Perbandingan\_Digitalisasi\_Perppajakan*. (n.d.).
- Hakizimana, N., & Santoro, F. (2023). *Technology Evolution and Tax Compliance: Evidence from Rwanda*. <https://doi.org/10.19088/ICTD.2023.033>
- Jameaba, M.-S. (2023). *Digitalization, Emerging Technologies, and Financial Stability: Challenges and Opportunities for the Indonesian Banking Sector and Beyond*. *Muyanja Ssenyonga Jameaba*. <https://doi.org/10.32388/CSTTYQ.3>
- Kang'oro, D., Ngerero, F., & Odongo, I. (2023). *Using Digital Technologies to Improve Tax Collection – the Case of Togo*. <https://doi.org/10.19088/ICTD.2023.054>
- Kurnia Rahayu, S., & Kusdianto, A. (n.d.). *Challenges of Digital Tax Administration Transformation in Indonesia*. [www.intechopen.com](http://www.intechopen.com)
- Latifa, F., Ritchi, H., & Tanzil, N. D. (n.d.). THE JOURNEY AND PERFORMANCE OF E-TAX INVOICING IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 8(1), 2023. [www.jraba.org](http://www.jraba.org)
- Louvieris, P., Ioannou, G., & White, G. (2024). *Making Tax Smart: Feasibility of Distributed Ledger Technology for building tax compliance functionality to Central Bank Digital Currency*. <http://arxiv.org/abs/2406.17512>
- Muslichah, M., Bashir, M., & Arniati, T. (2023). THE IMPACT OF TAX E-FILING SYSTEM QUALITY ON TAXPAYER SATISFACTION: PERCEIVED USEFULNESS AS MEDIATOR. *JRAK*, 15(2), 252–258. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i2.8715>
- Scarpini, C., Okunogbe, O., & Santoro, F. (2023). *The Promise and Limitations of Information Technology for Tax Mobilisation*. <https://doi.org/10.19088/ICTD.2023.005>

- Šoltésová, E. (2024). Digitisation of financial administration in the Slovak Republic. *Proceedings of the 17th International Scientific Conference INPROFORUM, 17*, 386–389. <https://doi.org/10.32725/978-80-7694-053-6.59>
- Tri Septianto, Koerniawan Dwi Wibawa, Ikhwan Baidlowi Sumafta, Imam Mudofir, & Meiliyana Susanti. (2023). The Perspective of Tax Center Digitalization in Strengthening Taxation Socialization: A Case Study at State Polytechnic of Madiun. *Jurnal Multidisiplin Madani, 3*(9), 1874–1884. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i9.5815>
- Universitas, N., Negeri, I., Makassar, A., & Mutiara Khansa, F. (n.d.). *Dampak Layanan Pajak Online Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak*.